



# Muda Bakal Evaluasi OPD

## Suprpto: Realisasi Terlambat, Serapan Anggaran Rendah

**KUBU RAYA-RK.** Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan pada Senin (24/6) siang menyampaikan Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran (TA) 2018 di sidang paripurna DPRD Kubu Raya.

Sidang paripurna ini merupakan yang pertama kali di era pemerintahan Muda-Jiwo yang memimpin hampir empat bulan.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suprpto ini juga dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo, unsur Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pidato Muda Mahendrawan terungkap bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp113,01 miliar. Dirl mana realisasi Pendapatan Daerah Rp1,58 triliun sedangkan Belanja Daerah Rp1,33 triliun. Pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan sebesar Rp86,00 miliar dan pengeluaran Rp12 miliar.

Menurut Muda, masih besarnya Silpa TA 2018 bersifat akumulasi dari seluruh anggaran.

"Memang masih banyak yang belum terserap, tapi ini akan dimasukkan di tahun anggaran 2019 ini. Jadi tidak menjadi problem," tuturnya.

Muda menolak menyatakan jika besarnya Silpa yang mengakibatkan serapan anggaran masih besar tersebut akibat dari masih tidak maksimalnya kinerja OPD.

"Saya tidak bisa menilai periode kinerja sebelum saya. Saya kira di situ sudah menjadi standar penilaian. bagaimana daya serap bisa maksimal. Kalau saya targetkan daya serap bisa di atas 90 persen. Jadi ke depan bisa kita maksimalkan," ucapnya.

Namun, Muda memastikan, dengan kondisi keuangan seperti ini maka pihaknya akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap

sejumlah OPD yang tidak melakukan penyerapan anggaran maksimal tersebut.

"Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi nantinya. OPD yang tidak bisa menyerap anggaran maksimal akan dievaluasi," tegasnya.

Apalagi hal ini berpengaruh terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemkab Kubu Raya belum lama ini dari BPK-RI.

"Ya memang harus kita pertahankan, apalagi sudah kita dapatkan selama lima kali sejak 2013 silam. Tapi WTP ini bukan untuk gagah-gagahan atau formalitas," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD

terangnya.

Bahkan, persentasenya disebutkan Suprpto terkadang hanya 60 persen yang terealisasi. Seperti Silpa TA 2018 yang mencapai Rp113 miliar, Suprpto menilai serapan anggaran tidak maksimal.

"Kita belum tahu apa masalahnya. Akan kita tanyakan nanti pada pembahasan. Apakah ini Silpa murni atau bukan. Kalau ini Silpa murni kita sangat menyayangkan karena akan kembali ke kas daerah yang artinya serapan anggaran tidak maksimal," pungkasnya.

**Reporter: Syamsul Arifin**  
**Redaktur: Andry Soe**

Kubu Raya, Suprpto menilai masalah penyerapan anggaran sudah menjadi rutinitas tahunan.

"Tetapi tatkala kita diminta agar APBD segera diketok palu dengan cepat ternyata realisasinya terlambat," ungkapnya.

Ia mencontohkan seringkali realisasi anggaran di triwulan ketiga. Mestinya hal itu sudah berjalan di triwulan pertama. "Ini yang harus terus menjadi evaluasi dan komitmen penyerapan anggaran bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Jangan sampai dinas berebut anggaran tapi ketika dianggarkan dinas tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Tidak ada tertib waktu,"





**PENYERAHAN.** Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyerahkan Nota Pengantar Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2018 ke Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suprpto, Senin (24/6) siang. **SYAMSUL ARIFIN-RK**